



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131 /PMK.02/2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan yang bersifat volatil, dapat diatur dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa penyelenggaraan pelatihan teknis substansi;
 - b. jasa penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi nonjabatan fungsional auditor;

- c. jasa penyelenggaraan pelatihan daring secara masif;
 - d. jasa penyelenggaraan lokakarya/workshop/seminar; dan
 - e. jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik pascapenilaian potensi/kompetensi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e tidak termasuk biaya perjalanan dinas untuk peserta.
- (2) Dalam hal jasa penyelenggaraan pelatihan teknis substansi dan jasa penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi nonjabatan fungsional auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b diselenggarakan di luar lingkungan kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak termasuk

biaya perjalanan dinas untuk penyelenggara dan pengajar.

- (3) Dalam hal jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik paska penilaian potensi/kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e diselenggarakan di luar lingkungan kantor *Management Assessment Center* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak termasuk biaya perjalanan dinas untuk penyelenggara dan asesor.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1062

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH 
NIP 19730213 199703 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/PMK.02/2021
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG
BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN


No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANSI		
	1. Metode tatap muka/ metode tatap muka kombinasi <i>e-learning</i>		
	a. Pelatihan sampai dengan 4 hari	Per Orang Per Hari	Rp 850.000,00
	b. Pelatihan di atas 4 hari	Per Orang Per Hari	Rp 780.000,00
	2. Metode jarak jauh/ metode jarak jauh kombinasi <i>e-learning</i>		
	a. Pelatihan sampai dengan 4 hari	Per Orang Per Hari	Rp 510.000,00
	b. Pelatihan di atas 4 hari	Per Orang Per Hari	Rp 468.000,00
II.	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI NONJABATAN FUNGSIONAL AUDITOR	Per Orang Per Hari	Rp 2.350.000,00
III.	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DARING SECARA MASIF	Per Orang	Rp 300.000,00
IV.	JASA PENYELENGGARAAN LOKAKARYA/ <i>WORKSHOP</i> / SEMINAR		
	A. Lokakarya/ <i>Workshop</i> 1 hari	Per Orang Per Hari	Rp 1.550.000,00
	B. Lokakarya/ <i>Workshop</i> 2 hari	Per Orang Per Hari	Rp 1.060.000,00
	C. Lokakarya/ <i>Workshop</i> 3 hari	Per Orang Per Hari	Rp 1.000.000,00
	D. Seminar	Per Orang Per Hari	Rp 1.200.000,00
	E. Seminar Daring Eksekutif	Per Orang	Rp 250.000,00
	F. Seminar Daring Umum	Per Orang	Rp 100.000,00
V.	JASA PENILAIAN POTENSI, PENILAIAN KOMPETENSI, DAN		

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	UMPAN BALIK PASCAPENILAIAN POTENSI/KOMPETENSI		
	A. Penilaian Potensi		
	1. Psikometri dan Wawancara dengan Laporan Panjang	Per Orang	Rp 1.500.000,00
	2. Psikometri dengan Laporan Panjang	Per Orang	Rp 980.000,00
	3. Psikometri dengan Laporan Pendek	Per Orang	Rp 780.000,00
	B. Penilaian Kompetensi		
	1. <i>Assessment Center</i> 2 hari, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Jenjang Utama, dan Pejabat Fungsional jenjang Madya	Per Orang	Rp 6.020.000,00
	2. <i>Assessment Center</i> 1 hari, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Jenjang Utama, dan Pejabat Fungsional jenjang Madya	Per Orang	Rp 4.670.000,00
	3. <i>Assessment Center</i> 1 hari, untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Jenjang Muda	Per Orang	Rp 4.470.000,00
	4. <i>Assessment Center</i> 1 hari, untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Jenjang Pertama, dan Pejabat Fungsional Umum	Per Orang	Rp 3.880.000,00
	C. Umpan Balik Pascapenilaian Potensi/Kompetensi		
	1. Umpan Balik Pascapenilaian Potensi/Kompetensi secara Lisan dan Tertulis	Per Orang	Rp 700.000,00
	2. Umpan Balik Pascapenilaian Potensi/Kompetensi secara Tertulis	Per Orang	Rp 400.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


 ANDRIANSYAH
 NIP 19730213-199703 1 001